



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
INTI SARI	x
ABSTRACT	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Keaslian Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum	17
B. Kepastian Hukum Dalam Peraturan Perundangan	24
C. Kerugian Keuangan Negara	29
D. Mekanisme Penyelidikan dan Penyidikan Polri	40
BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Jenis Penelitian	48
B. Bahan Penelitian	48
C. Lokasi dan Subyek Penelitian	51



D. Teknik Pengumpulan Data	52
E. Analisis Data	57
F. Jalannya Penelitian	58
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	60
A. Prospek Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Pasca Penghapusan Kata "Dapat" Di Pasal 2 Ayat (1) Dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Dalam Timbulnya Kepastian Hukum Penetapan Tersangka	60
B. Analisis Peran BPKP sebagai lembaga penilai kerugian keuangan negara Pasca Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 dalam proses penegakan hukum tindak pidana korupsi oleh penyidik Polri	87
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	144
A. Kesimpulan	144
B. Saran	145
DAFTAR PUSTAKA	147
INDEKS ISTILAH	153
INDEKS SUBYEK	164
GLOSARIUM	169